

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
Tahun 2025



DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA
KABUPATEN GORONTALO



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 476 /20/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Persiapan Penyusunan Rencana Kerja meliputi Penyusunan Rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk lancarnya penyusunan rancangan awal Rencana Kerja sebagaimana pada huruf a, maka perlu dibentuk tim yang bertugas untuk itu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Telaahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Nomor : 01/Kominfo/641/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2026, Rancangan Rencana Kerja 2026, Perubahan Rencana Kerja 2025, Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 dan Rencana Kerja 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 yang meliputi Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renja;
- b. menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 yang meliputi Rancangan Perubahan Renja dan Rancangan Akhir Perubahan Renja;
- c. menyiapkan bahan dan data penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian sasaran rencana strategis sampai dengan tahun berjalan;
- e. menyusun Program dan Kegiatan dengan berpedoman pada Renstra;
- f. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data sekunder yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja;
- g. membuat kesimpulan tentang faktor keberhasilan suatu organisasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- h. merumuskan tantangan, ancaman dan kekuatan serta peluang keberhasilan pelaksanaan tugas SKPD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 476/26/XII/2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GORONTALO

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KETUA	
2	SEKERTARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIS	
3	KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA	
6	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
7	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
8	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA	

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 384/28/VII/2025

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Telaahan Staf Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor B.000.7/264/Bapelitbangda/2025 Tanggal 11 Juni 2025, Perihal Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU: Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dalam dokumen dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III : Rencana Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 18 JULI 2025

BUPATI GORONTALO, 

SOFYAN PUHI

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 384/28/VII/2025

TANGGAL : 18 JULI 2025

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	SKPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Kepegawaian dan Diklat
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Dinas Kesehatan
11	BLUD RSUD Dr MM Dunda
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14	Dinas Sosial
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Dinas Ketahanan Pangan
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
22	Dinas Perhubungan
23	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

27	Dinas Perpustakaan dan Arsip
28	Dinas Perikanan
29	Dinas Pertanian
NO	SKPD
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32	Satuan Polisi Pamong Praja
33	Kecamatan Limboto
34	Kecamatan Limboto Barat
35	Kecamatan Telaga
36	Kecamatan Telaga Biru
37	Kecamatan Tibawa
38	Kecamatan Pulubala
39	Kecamatan Batudaa
40	Kecamatan Bongomeme
41	Kecamatan Batudaa Pantai
42	Kecamatan Mootilango
43	Kecamatan Boliyohuto
44	Kecamatan Tolangohula
45	Kecamatan Tilango
46	Kecamatan Tabongo
47	Kecamatan Biluhu
48	Kecamatan Asparaga
49	Kecamatan Telaga Jaya
50	Kecamatan Bilato
51	Kecamatan Dungaliyo


 BUPATI GORONTALO, 

 SOFYAN PUHI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT karena hanya atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 mengacu pada kerangka yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan ini dapat dikerjakan dengan fokus melalui pengkajian terlebih dahulu.

Tak ada gading yang tak retak, kami pun menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini tentunyata lepas dari kesalahan dan kekhilafan, olehnya melalui kesempatan ini kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya dokumen ini.

Akhir kata, partisipasi semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 ini, baik dalam bentuk kontribusi data maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih.

Limboto, Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gorontalo



Dr. Drs. SAFWAN TAHIR BANO, M.Pd.I
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19681130 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA	5
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN	
BERKENAAN	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
1	Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kominfo Kabupaten Gorontalo	8
2	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Tahun 2025	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai tindak lanjut terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan pada semester pertama tahun berjalan. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk menyesuaikan rencana kegiatan dengan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan I dan II, serta adanya kebijakan refocusing anggaran pada beberapa subkegiatan strategis.

Perubahan difokuskan pada aspek belanja modal yang mendukung peningkatan kualitas penyebaran informasi publik, khususnya dalam pengadaan alat visualisasi dan perangkat podcast. Di samping itu, perubahan juga mencakup penyesuaian dan penambahan pagu anggaran pada beberapa subkegiatan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal yang tersedia.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
17. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan RKP Tahun 2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Gorontalo;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9).
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025

23. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 13 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan dengan hasil evaluasi capaian kinerja serta menyesuaikan rencana belanja dengan kebijakan refocusing anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya dokumen ini adalah:

1. Memberikan arah perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang realistis dan responsif terhadap perkembangan pelaksanaan di lapangan;
2. Menyempurnakan rencana kerja tahunan agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang aktual dan kebutuhan riil masyarakat;
3. Menyesuaikan target dan alokasi anggaran program / kegiatan / sub kegiatan dengan kapasitas fiskal dan kebijakan daerah tahun berjalan.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Evaluasi atas capaian kinerja triwulan I dan II menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian agar sasaran pembangunan daerah tetap dapat tercapai secara optimal.

Selain itu, adanya kebijakan refocusing anggaran dari pemerintah daerah menuntut penataan kembali prioritas kegiatan serta alokasi belanja, sehingga penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan efisien. Penyesuaian ini terutama difokuskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta optimalisasi fungsi kehumasan dan persandian.

Perubahan rencana kerja ini juga mempertimbangkan adanya kebutuhan baru yang mendesak, seperti pengadaan peralatan studio untuk mendukung sarana visualisasi dan podcast, serta fasilitas untuk pengelolaan infomasi dan komunikasi yang sebelumnya belum tertuang dalam dokumen rencana kerja awal. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan aktual, meningkatkan kinerja

perangkat daerah, serta memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan tujuan RPJMD Kabupaten Gorontalo.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Terdiri atas Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sebelumnya

Berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II, Analisis kinerja pelayanan serta capaian kinerja Triwulan II.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang rencana kerja pendanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025.

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo diatur melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2022.

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada Semester I melaksanakan 5 Program, 10 Kegiatan, dan 21 Sub Kegiatan, dengan beroleh penetapan anggaran sebesar Rp. 7.509.877.197,00.- (Tujuh miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.751.643.674,00.- (Dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), atau capaian realisasi sebesar 37 persen.

Ada pun realisasi program dapat dijelaskan sebagai berikut:

. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Realisasi Rp. 1.838.263.674,00.-
- Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja
 - Anggaran sebesar Rp 12.450.000 dengan realisasi Rp. 4.150.000 serta capaian kinerja 50% menunjukkan kinerja berjalan sesuai jadwal dan progresnya telah mencapai setengah target yang direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- Anggaran sebesar Rp. 2.155.238.907 dengan realisasi Rp. 90.496.624, serta capaian kinerja 50% menunjukkan kinerja berjalan sesuai jadwal dan progresnya telah mencapai setengah target yang direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah
 - Anggaran sebesar Rp. 75.320.000 dengan realisasi Rp. 27.710.847, serta capaian kinerja 50% menunjukkan kinerja berjalan sesuai jadwal dan progresnya telah mencapai setengah target yang direncanakan.
- Kegiatan Administrasi keuangan
 - Anggaran sebesar Rp. 3.158.564.543 dengan realisasi Rp. 1.586.518.387, serta capaian kinerja mencapai 50%, menunjukkan kelancaran pembayaran gaji/tunjangan dan pengelolaan keuangan.
- Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah
 - Anggaran sebesar Rp. 92.530.000, dengan realisasi Rp. 129.387.816, serta capaian kinerja baru mencapai 41,67%, dipengaruhi oleh tertundanya beberapa pengadaan logistik dan perlengkapan kantor.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Realisasi Rp. 231.280.000,00.-
- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000, dengan realisasi Rp. 231.280.000, serta capaian kinerja mencapai 54,17%, menunjukkan bahwa sub-sub kegiatan berhasil dijalankan secara optimal.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (SPBE)

- Realisasi Rp. 682.100.000,00.-
- Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Anggaran sebesar Rp. 62.776.000, dengan realisasi Rp. 62.000.000, serta capaian kinerja mencapai 100%, menunjukkan bahwa sub-sub kegiatan berhasil dijalankan secara optimal.
- Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Anggaran sebesar Rp. 1.841.080.668, dengan realisasi Rp. 620.100.000, dan capaian kinerja sebesar 50%, menunjukkan bahwa sub-sub kegiatan berhasil dijalankan secara optimal.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Realisasi Rp. 0,00.-
- Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota
 - Anggaran sebesar Rp. 60.000.000, belum ada penyerapan anggaran karena pelaksanaan sub kegiatan dijadwalkan pada triwulan berikutnya.

e. Program Penyelenggaraan Persandian

- Realisasi Rp. 0,00.-
- Kegiatan Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Anggaran sebesar Rp. 10.000.000, belum ada penyerapan anggaran karena pelaksanaan sub kegiatan dijadwalkan pada triwulan berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja fisik dan keuangan masih berada pada kisaran rendah hingga tinggi, dengan beberapa subkegiatan yang telah terealisasi secara optimal dan sebagian lainnya masih di bawah target semester.

Tabel TC. 29

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kominfo Kabupaten Gorontalo

N o	Sas aran	Kode					Programi/Kegi atani/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra OPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2024			Target Kinerja Renja 2025			Realisasi Kinerja dan Tingkat Capaian Renja s/d Triwulan II Tahun 2025				Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025							
																			Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja		Realisasi Kinerja Renstra			Realisasi Tingkat Capaian Kinerja			
									K	RP		K	RP		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
1	2	3					4	5	6			7			8			9			10 = 9 / 8 x 100			11 = 7 + 9			12 = 11 / 6 x 100		
1		X	X	X	1		Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	100	%	#####	55,19	%	5.130.564.219	100	%	4.375.850.529	40,6	%	1.838.263.674	40,63	42,01	35,7	95,82	%	6.968.827.893	95,82	%	28,36
							Perencanaan, Pengangara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	25.000.000	100	%	3.650.000	100	%	12.450.000	25	%	4.150.000	25	%	33	125	%	7.800.000	125	%	31
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Diskominfo Kabgor yang tersusun	25	Dok	25.000.000																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4	dok	3.650.000	4	dok	12.450.000	1	dok	4.150.000	25	%	33	5	dok	7.800.000	0	%	0
		X	X	X	1	2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	%	1.354.120.000	67	%	4.760.126.245	100	%	250.358.239	50	%	90.496.624	50	%	36,147	117	%	4.850.622.869	117	%	358
		X	X	X	1	2,08	Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bln	886.120.000																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24	laporan	4.600.150.245	12	laporan	167.038.239	6	laporan	51.529.969	50	%	31	30	laporan	4.651.680.214	0	lap	0

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1	unit		39.978.934	1	unit	35.170.000	0	unit		0	0	unit	-		1	unit	39.978.934	0		0
		X	X	1	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit		1.385.000.000																				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1	unit		49.900.000	1	unit	0	0	unit		0	0	unit		0	1	unit	49.900.000	0	
							Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	%	#####	100	%	5.593.527.506	100	%	3.408.838.290	50	%	1.586.518.387	50	%	46,54	150	%	3.804.428.559	125	%		22		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bln	16.534.606.440																					
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25	org/bln	5.264.947.506	25	org/bln	3.238.798.290	25	org/bln	1.498.498.387	100	org/bln	46,27	50	org/bln	6.763.445.893	0		0		
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Bln	854.470.000																					
								Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				48	dok	328.580.000	12	dok	170.040.000	6	dok	88.020.000	50	%	51,76	54	dok	416.600.000	0		0		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	3.243.831.775	49,45	%	298.381.406	100	%	69.764.296	41,7	%	30.099.840	41,67	%	43,145	91,12	%	328.481.246	91,12	%		10,1263		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Bln	37.000.000																					

								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				0	pake t	-		1	paket	2.450.250	1	paket	1.985.000	100	%	81,01	1	paket	1.985.000	0	pa ket	0
								Penyediaan Bahan/Material	5	Jenis	70.000.000																			
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0	pake t	0	0	paket	0	0	paket	0	0	%	0	0	paket	0	0	pa ket	0	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	Jenis	638.391.000																			
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4	pake t	44.867.000	2	paket	22.624.046	2	paket	8.939.000	100	%	39,51	6	paket	53.806.000	0	pa ket	0	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Jenis	539.980.000																			
								Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				0	pake t	0	0	paket	0	0	paket	0	0	%	0	0	paket	0	0		0	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125	Jenis	36.000.000																			
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				0	pake t	-	0	paket	-	0	paket	0	0	%	0	0	paket	-	0		0	
								Jumlah Penyelenggara an Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Kali	1.922.460.775																			
								Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88	laporan	253.514.406	50	laporan	44.690.000	24	laporan	19.175.840	48	%	42,90857	112	paket	272.690.246	0		0	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	110	Unit	220.000.000			-	15	Unit	-	0	unit	-	-	%	0	-	%	-	-	%	0	

17

								Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan					0	unit		0	1	Aplikasi	40.200.000	50	Aplikasi	20.100.000	5000	%		50	50	dok	20.100.000	0		0	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral	85,29	%	2.385.000.000	20,68	%	-	17,65	%	7.500.000	0	%	-	-	%	0	-	%	-	-	%	-	-	%	0
								Penyelenggaraan statistik sektoral dilengkapi pemerintah daerah kabupaten/kot a	persentase terbangunnya satu data daerah	50	%	2.385.000.000	50	%	247.732.060	50	%	7.500.000	0	%	-	-	%	0	50	dok	7.500.000	100	0,31				
							persentase pemanfaatan data untuk pembangunan . Daerah		10	%	10		%	10		%	0		%	%			0	50	dok								
								Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	jumlah buku data postensi pembangunan	4	Dok	750.000.000																					
									Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisisdan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2	dok	-	0	dok	0	0	%	-	-	%	0	-	%	-	0	%	0			
								peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	jumlah pelatihan/Bimtek kapasitas SDM Pemerintah daerah kabupaten gorontalo	2	Kali	825.000.000																					
									Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerahyang Terintegrasi				240	orang	-	0	orang	0	0	%	-	-	%	0	-	%	-	0	%	0			
								membangun metadata statistik sektoral	persentase ketersediaan data statistik	25	%	810.000.000																					
									Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2	dok	-	1	dok	0	0	%	-	-	%	0	-	%	-	0	%	0			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025, dan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang bersimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Perubahan Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA			TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	20	21		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								6.705.803.450,00	7.509.877.197,00	6.983.193.804,50	277.390.354,50				8.599.097.863,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.705.803.450,00	7.509.877.197,00	6.983.193.804,50	277.390.354,50					8.599.097.863,00			
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.685.803.450,00	7.439.877.197,00	6.925.693.804,50	239.890.354,50					7.899.097.863,00			
1,	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	5.485.803.450,00	4.336.020.529,00	3.699.344.136,50	-338.705.587,00					5.147.097.863,00			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	4.150.000,00	12.450.000,00	16.600.000,00	12.450.000,00			ASN dilingkungan Dinas Kominfo		5.000.000,00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.150.000,00	12.450.000,00	16.600.000,00	12.450.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00	DINAS KOMUNIK ASI DAN INFORMA TIKA		

	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.158.564.543,00	3.408.838.290,00	3.012.421.194,00	-146.143.349,00			-		3.475.413.388,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.034.724.543,00	3.238.798.290,00	2.832.381.194,00	-202.343.349,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.324.413.388,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	123.840.000,00	170.040.000,00	180.040.000,00	56.200.000,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			151.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	92.530.000,00	589.054.000,00	399.458.502,50	306.928.502,50			ASN		883.534.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.450.250,00	2.450.250,00	2.450.250,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	66.956.750,00	66.956.750,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.624.046,00	22.624.046,00	18.024.062,00	-4.599.984,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.455.704,00	519.289.704,00	289.682.440,50	262.226.736,50	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	40.000.000,00	44.690.000,00	22.345.000,00	-17.655.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			567.534.475,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.155.238.907,00	250.358.239,00	195.544.440,00	-1.959.694.467,00			-		320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	12 Laporan	2.071.918.907,00	167.038.239,00	106.734.440,00	-1.965.184.467,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.320.000,00	7.320.000,00	12.810.000,00	5.490.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	75.320.000,00	75.320.000,00	75.320.000,00	0,00			-		463.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.150.000,00	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			38.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	35.170.000,00	35.170.000,00	35.170.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Persepsi Publik terhadap pemerintah Daerah				70 % (B)	70 % (B)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.302.493.000,00	-673.000.000,00					527.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75 %	75 %	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.302.493.000,00	102.493.000,00			ASN		527.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				50 Laporan	50 Laporan	1.106.000.000,00	994.000.000,00	912.500.000,00	-193.500.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				0 Komunitas	1 Komunitas	0,00	0,00	100.989.000,00	100.989.000,00	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																

			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				4 Permohonan	4 Permohonan	61.000.000,00	173.000.000,00	209.915.000,00	148.915.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis				1 Media	1 Media	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																
			Jumlah Konten Informasi Publik				120 Konten	120 Konten	0,00	0,00	46.089.000,00	46.089.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan SPBE di Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo				70,59 %	70,59 %	0,00	1.903.856.668,00	1.923.856.668,00	2.225.000.000,00					2.225.000.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah				44 Domain/ Sub domain	44 Domain/ Sub domain	0,00	62.776.000,00	62.776.000,00	62.776.000,00			-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																

			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	62.776.000,00	62.776.000,00	62.776.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi				12 Aplikasi/ Lynn Publik	12 Aplikasi/ Lynn Publik	0,00	1.841.080.668,00	1.861.080.668,00	1.861.080.668,00			Organisasi Perangkat Daerah	2.075.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah															
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				1 Aplikasi	1 Aplikasi	0,00	40.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota															
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				0 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	0,00	1.800.880.668,00	1.800.880.668,00	1.800.880.668,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							10.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00				500.000.000,00	
1,	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral				29,41 %	29,41 %	10.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00	490.000.000,00				500.000.000,00	

	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbangunnya satu data daerah				29,41 %	29,41 %	10.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00	45.000.000,00			-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				0 Orang	243 Orang	10.000.000,00	41.800.000,00	36.800.000,00	26.800.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00					200.000.000,00	
1,	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				29,41 %	29,41 %	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	190.000.000,00					200.000.000,00	

	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sistem informasi yang bersertifikat Elektronik				29,41 %	29,41 %	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00			OPD		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gorontalo, Limboto, Kayubulan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								6.705.803.450,00	7.509.877.197,00	6.983.193.804,50	277.390.354,50					8.599.097.863,00	

BAB IV

PENUTUP

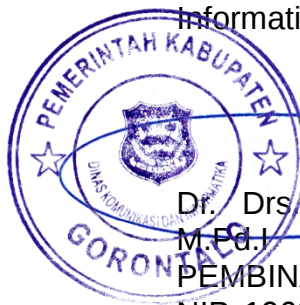
Perubahan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo tahun 2025 sebagai evaluasi rencana kerja tahunan tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Perubahan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dibiayai melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Perubahan anggaran tahun 2025 disusun sebagai bahan masukan di dalam perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Diskominfo Kabupaten Gorontalo tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dan dengan bidang dan tugas fungsinya, serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Gorontalo tahun 2025, yang lebih terkoordinasi.

Demikian penyusunan dokumen renja perubahan diskominfo Kabupaten Gorontalo, kami menyadari dalam penyusunan renja perubahan ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu diperlukan masukan dan saran dari semua pihak terkait guna penyempurnaan penyusunan renja pada periode berikutnya.

Limboto, Juli 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gorontalo



Dr. Drs. SAFWAN TAHIR BANO,
M.Pd.I
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19681130 199603 1 003